

Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan

Sri Rahayu Syukur ^{1✉} Abdul Rahman Mus ² Darwis Lannai ³ Asriani Junaid ⁴

^{1,2,3,4} *Universitas Muslim Indonesia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Populasi pada penelitian ini ditekankan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Enrekang yang berjumlah sebanyak 42 OPD, sedangkan untuk menentukan jumlah sampel maka diambil masing-masing satu Kasubag di OPD se Kabupaten Enrekang, sehingga ditentukan sampel sebanyak 42 orang, dengan teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden. Adapun teknik analisis data menggunakan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menemukan bahwa kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: *Kejelasan anggaran; sistem pengendalian intern; anggaran berbasis kinerja, kinerja keuangan.*

Abstract

This study aimed to analyze the effect of budget clarity, internal control system, and performance-based budgeting on financial performance in the Enrekang Regency Government. The population in this study was emphasized on Regional Apparatus Organizations (OPD) throughout Enrekang Regency, which amounted to 42 OPDs. One Head of Sub-section was taken in each OPD in Enrekang Regency to determine the number of samples. A sample of 42 people was determined, with a sampling technique by using a saturated sampling technique. This study used primary data collected by distributing questionnaires to all respondents. The data analysis technique uses research instrument testing, classical assumption, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The study results found that budget clarity, internal control systems, and performance-based budgets positively and significantly influence financial performance in the Enrekang Regency Government.

Keywords: *Budget clarity; internal control system; performance-based budgeting, financial performance.*

Copyright (c) 2022 Sri Rahayu Syukur

✉ Corresponding author :

Email Address : sriahayu240885@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sendirinya akan menjadi tuntutan penting bagi aparaturnya pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun telah pula menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, sehat dan terukur pada setiap lini pemerintahan (Auditya et al., 2013; Hasanuddin et al., 2021). Sementara itu, bank dunia lebih melihat tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi, bahwa suatu negara telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat, serta bertanggungjawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintahan yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan. Penerapan otonomi daerah melalui pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya beserta wilayahnya sendiri secara otonom, serta merta berimbang pada hak otonom pengelolaan keuangan daerah (Tolley, 2017)..

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat (Rahim et al., 2020). Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung-jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Abdul Halim, 2013).

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada masalah kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja. Kejelasan anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah, anggaran adalah merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2014; Haryono & Djasuli, 2016). Anggaran berisi mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam membiayai kegiatan pemerintah. Anggaran memiliki fungsi, antara lain sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja keuangan, alat pemotivasi, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Mahsun, 2006).

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Disinilah pentingnya kejelasan sasaran anggaran yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah (Siregar, 2009; Safrial, 2016). Kejelasan sasaran anggaran adalah menggambarkan lingkup anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Hal ini akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian (Wiprast et al., 2014) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Begitu pula dengan hasil penelitian (Lintas, 2013; Handayani & Retnani, 2018) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Kemudian untuk meningkatkan kinerja keuangan maka perlu diperhatikan sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016; Langi et al., 2019; Sari & Muslim, 2021). Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya (Rai, 2008; Ibrahim et al., 2017). Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern yang berlaku pada suatu organisasi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang khusus terhadap efektif tidaknya sistem pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Fannur, 2015; Hanum et al., 2018).

Selain kejelasan anggaran dan sistem pengendalian intern, maka anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dimana sejak lahirnya Undang-undang No. 17 tahun 2003 yang mengharuskan adanya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam sektor publik yang menuntut pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam proses penganggaran (Kalauw, 2018). Membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan, sistem perencanaan anggaran negara pada saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM). Munculnya konsep New Public Management (NPM) berpengaruh langsung terhadap konsep

anggaran negara pada umumnya. Salah satu pengaruh itu adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada basis kinerja. Anggaran berbasis kinerja (performance budget) pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja keuangan (Mardiasmo, 2021). Begitu pula bahwa performance budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2011).

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara lokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (tax payers) (Fransisca et al., 2018). Penelitian sebelumnya (Lubis, 2009; Esni et al., 2019; Purnamasari, 2018) menemukan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Enrekang.

Teori New Public Management (NPM) pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991. New Public Management (NPM) adalah suatu teknik manajemen publik untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan cara memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke dalam sektor publik (Indrawati, 2016). New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua orang, bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management, bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar ahli membedakan antara pendekatan manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut, dan dapat dimengerti oleh kepala dinas instansi yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya (Aprilianti et al., 2020). Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif, dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja,

penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap pegawai terhadap anggaran, kinerja untuk anggaran tersebut dan efisiensi biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas.

Perlunya pengendalian intern di seluruh kegiatan pemerintahan menjadikan adanya sebuah sistem pengendalian intern yang dibuat menjadi Peraturan Pemerintah yaitu Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Herawati, 2014).

Penganggaran berbasis kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan terukur juga penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output (Mauro et al., 2017; Nanda & Darwanis, 2016).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kinerja adalah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006).

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Abbas, 2020).

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah, karena kejelasan sasaran anggaran adalah menggambarkan lingkup anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Siregar, 2009; Safrial, 2016). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Kennis, 1979; Hidayat, 2015). Hasil penelitian ditemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial (Wiprast et al., 2014). Begitu pula dengan hasil penelitian (Lintas, 2013; Handayani & Retnani, 2018) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Kejelasan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern yang berlaku pada suatu organisasi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang khusus terhadap efektif tindaknya sistem pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern yang berlaku pada suatu organisasi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

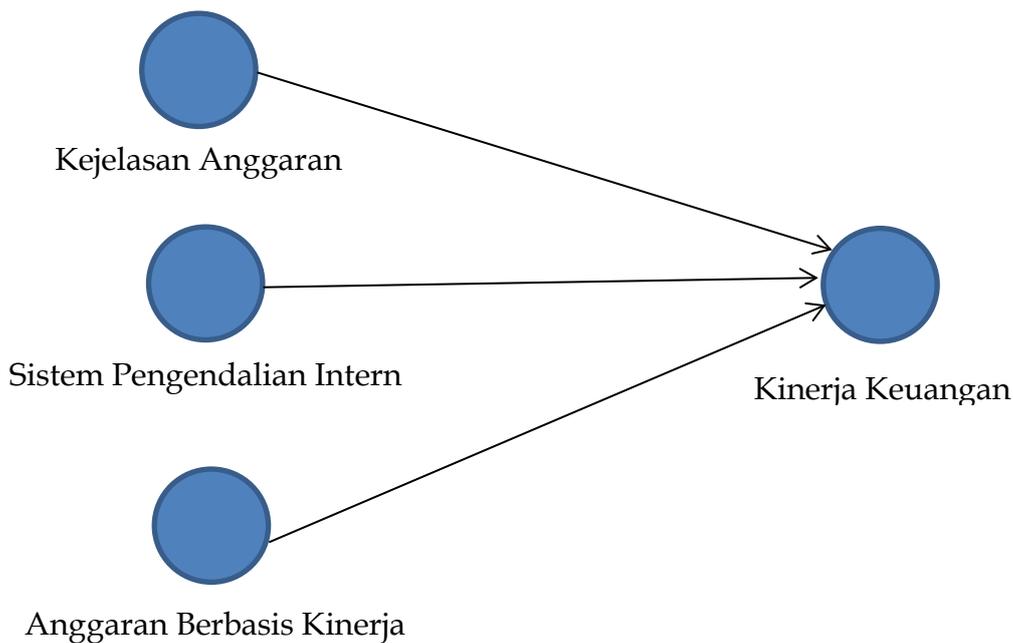
Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang khusus terhadap efektif tidaknya sistem pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Penelitian (Fannur, 2015; Hanum et al., 2018) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Begitu pula hasil temuan peneliti sebelumnya bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Pujiono et al., 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

Performance budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Bastian, 2011). Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja (Abdul Halim, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan (Lubis, 2009; Setya, 2010; Purnamasari, 2018) menjelaskan bahwa pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 = Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Model penelitian ini seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini ditekankan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Enrekang yang berjumlah sebanyak 42 OPD, sedangkan untuk menentukan jumlah sampel maka diambil masing-masing satu Kasubag di OPD se Kabupaten Enrekang, sehingga ditentukan sampel sebanyak 42 orang, dengan teknik penarikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang diisi dengan beberapa pernyataan dengan lima opsi jawaban yang akan diberi bobot skor seperti jawaban (Sangat Setuju=5, Setuju=4, Cukup Setuju=3, Tidak Setuju=2, Sangat Tidak Setuju=1). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui empat tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik deskriptif. Tahap kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Kode	Indikator	Referensi
Kejelasan Anggaran (X1)	X1.1	Jelas	(Mahmudi, 2016; Hidayat, 2015)
	X1.2	Spesifik	
	X1.3	Mengerti	
Sistem Pengendalian Intern (X2)	X2.1	Lingkungan pengendalian	(Hanum et al., 2018; Tolley, 2017)
	X2.2	Pemantauan	
	X2.3	Penilaian resiko	

(X2)	X2.4	Kegiatan pengendalian	
	X2.5	Informasi dan komunikasi	
Anggaran	X3.1	Akuntabilitas agensi	(Mahmudi,
Berbasi Kinerja	X3.2	Fleksibilitas anggaran	2016; Nanda &
(X3)	X3.3	Koordinasi	Darwanis, 2016)
	X3.4	Keterlibatan masyarakat	
	X3.5	Incentive agensi	
Kinerja	Y1.1	Masukan (input)	(Hanum et al.,
Keuangan	Y1.2	Keluaran (output)	2018;
(Y)	Y1.3	Hasil (outcome)	Purnamasari,
			2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka tahap pertama akan dilakukan uji instrument penelitian guna menguji seberapa valid dan andalnya suatu instrument yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Instrumen	Korelasi Bivariate	Korelasi Standar	Cronbach's Alpha	Keputusan
Kejelasan Anggaran (X1)	X _{1.1}	0,499	0,30	0,60	Valid dan reliabel
	X _{1.2}	0,488	0,30		Valid dan reliabel
	X _{1.3}	0,425	0,30		Valid dan reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X2)	X _{2.1}	0,330	0,30	0,60	Valid dan reliabel
	X _{2.2}	0,440	0,30		Valid dan reliabel
	X _{2.3}	0,358	0,30		Valid dan reliabel
	X _{2.4}	0,496	0,30		Valid dan reliabel
	X _{2.5}	0,473	0,30		Valid dan reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja (X3)	X _{3.1}	0,672	0,30	0,60	Valid dan reliabel
	X _{3.2}	0,693	0,30		Valid dan reliabel
	X _{3.3}	0,497	0,30		Valid dan reliabel
	X _{3.4}	0,491	0,30		Valid dan reliabel
	X _{3.5}	0,338	0,30		Valid dan reliabel
Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Y ₁	0,613	0,30	0,60	Valid dan reliabel
	Y ₂	0,700	0,30		Valid dan reliabel
	Y ₃	0,415	0,30		Valid dan reliabel

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa variabel kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern, anggaran berbasis kinerja serta kinerja keuangan pemerintah terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rstandar (0,30). Sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing variabel sudah valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas untuk semua variabel menunjukkan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh

alat ukur adalah reliabel (alat ukur terpenuhi) dan dapat digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov test. Pengujian ini dengan menggunakan probabilitas (ρ) yang harus lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0.05, agar data ini dapat dikatakan berdistribusi normal, yang ditunjukkan melalui tabel 3.

Tabel 3. Uji Normalitas dengan Metode Kolmogorov-Smirnov

Variabel Dependen	Variabel Independen	Kolmogorov-Smirnov	Sig	Keterangan
Kinerja Keuangan Daerah	Kejelasan anggaran	0,113	0,200	Data residual Sudah berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas yang sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel 3, yang diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,200. Data tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang akan diregresikan sudah berdistribusi normal, sehingga telah memenuhi uji asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Colinieritas Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
Kinerja Keuangan	Kejelasan Anggaran	0,876	1,142	Tidak terjadi multikolinearitas
	Sistem Pengendalian Intern	0,806	1,241	
	Anggaran Berbasis Kinerja	0,804	1,243	

Tabel 4 yakni hasil uji multikolinearitas yang dilihat dari nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,01 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan nilai VIF tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser dengan bantuan SPSS release 24. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolute residual sebagai variabel dependen dengan semua variabel independen dalam model.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Model Residual	Variabel Independen	Sig	Keterangan
ABRES	Kejelasan Anggaran	0,409	Tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai $pvalue > 0,05$
	Sistem Pengendalian Intern	0,198	
	Anggaran Berbasis Kinerja	0,830	

Berdasarkan Tabel 5, yakni hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, terlihat bahwa setiap variabel bebas (kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja) dalam penelitian ini tidak ada satupun yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (nilai absolut residual). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan demikian bahwa model regresi telah lolos dari uji heteroskedastisitas.

Tahap keempat yaitu analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern, dan anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan sistem komputersasi program SPSS release 24.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Variabel Penelitian	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	0,054	1,801	
Kejelasan Anggaran	0,251	0,106	0,268
Sistem Pengendalian Intern	0,292	0,080	0,429
Anggaran Berbasis Kinerja	0,156	0,059	0,310

Dari tabel 6 yaitu hasil pengolahan data regresi linear berganda, maka akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,054 + 0,251X_1 + 0,292X_2 + 0,156X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa nilai $\beta_0 = 0,054$ yang artinya jika kejelasan anggaran 0, sistem pengendalian intern 0 dan anggaran berbasis kinerja 0, maka kinerja keuangan adalah 0,054, sementara nilai $\beta_1 = 0,251$ yang diartikan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh positif, yang berarti jika kejelasan anggaran meningkat sebesar 1% maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,251%, dan nilai $\beta_2 = 0,292$ yang diartikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif, yang berarti bahwa jika sistem pengendalian intern meningkat sebesar 1% maka akan diiringi dengan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,292% serta nilai $\beta_3 = 0,156$ yang berarti bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, yang berarti bahwa apabila anggaran berbasis kinerja ditingkatkan maka akan berpengaruh

secara nyata dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui variabel-variabel secara independen simultan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan ρ -value pada kolom sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika ρ -value lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak, sebaliknya jika ρ -value lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Serempak (uji F)

Variabel Dependen	Variabel Independen	F	Sig.
Kinerja keuangan (Y)	Kejelasan anggaran (X1) Sistem pengendalian intern (X2) Anggaran berbasis kinerja (X3)	17,080	0,000

Berdasarkan data pada tabel 7, maka diperoleh nilai sig. 0,000, karena nilai sig. lebih kecil dari nilai standar 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern, dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara bersama-sama atau serempak terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel yakni: kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern, dan anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Jika ρ value lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak. Sebaliknya jika ρ value lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Variabel Dependen	Variabel Independen	t	Sig.	Keterangan
Kinerja Keuangan	Kejelasan Anggaran	2,365	0,023	Signifikan
	Sistem Pengendalian Intern	3,635	0,001	Signifikan
	Anggaran Berbasis Kinerja	2,624	0,012	Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial maka dapat diketahui bahwa pengaruh kejelasan anggaran terhadap kinerja keuangan memiliki nilai probabilitas $0,023 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh signifikan antara kejelasan anggaran terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Sementara pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan memiliki nilai probabilitas $0,001 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 2 diterima dan pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan memiliki probabilitas nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

Selanjutnya analisis koefisien korelasi dan determinasi. Koefisien korelasi merupakan (KK) indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan antar variabel.

Tabel 9. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.541	.76684

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien korelasi maka diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,758, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 75,8% yang berarti bahwa tingkat hubungan antar variabel kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang termasuk pada tingkat hubungan yang kuat. Selain itu diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,541 artinya terdapat pengaruh sebesar 54,1%, variasi perubahan kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja, sedangkan sisanya sebesar 45,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh kejelasan anggaran terhadap kinerja keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Dari hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan kejelasan anggaran yang dilaksanakan selama ini sudah berada dalam kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat dari kejelasan rencana kerja dalam anggaran yang dibuat oleh bagian anggaran sudah mampu terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif pada bagian/bidang anggaran. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah dibuat oleh bagian anggaran sudah mencantumkan jenis item anggaran pendapatan dan belanja daerah, nilai anggaran dan realisasi anggaran dalam tahun anggaran. Kemudian dalam penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh kantor pemerintah daerah selama ini dimana setiap bagian/bidang yang ada dalam lingkup kantor pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sudah menetapkan spesifikasi anggaran yang telah dibuat selama ini. Pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh bagian anggaran pada Kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang sudah memiliki kejelasan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa pimpinan kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang sudah mengetahui secara jelas pendapatan daerah (Outcome) seperti pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan transfer (bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) lain- lain pendapatan yang sah (dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana desa). Kemudian dalam penelitian ini bahwa skor dari persepsi pegawai dari setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang tertinggi adalah adanya kejelasan anggaran oleh pimpinan kantor pemerintah daerah dari outcome/hasil yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan pada kantor pemerintah di Kabupaten Enrekang. Sedangkan yang terendah adalah kejelasan rencana kerja dan anggaran yang terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif pada setiap divisi atau bagian/bidang. Sehingga hal ini perlu ditingkatkan dengan lebih mendefinisikan secara jelas dan komprehensif dari divisi/bagian yang ada pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan anggaran pada

setiap program/kegiatan yang ada pada bagian/bidang pada kantor pemerintah Kabupaten Enrekang dapat memberikan dampak yang bermakna dalam meningkatkan kinerja keuangan, dimana semakin baik kejelasan anggaran maka secara bermakna akan meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pada kantor pemerintah di Kabupaten Enrekang. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejelasan anggaran dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan alasannya karena setiap item anggaran dalam rencana kerja yang disusun pada anggaran sudah jelas dan sudah komprehensif.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Lintas, 2013; Handayani & Retnani, 2018) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian teori New public Management (NPM) yang disadur dalam buku (Bastian, 2011) yang mengemukakan bahwa faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap konsep negara pada umumnya adalah New public Management (NPM) dimana salah satu pengaruh itu adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Kemudian (Kennis, 1979; Hidayat, 2015) menyatakan bahwa sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lintas, 2013; Wiprast et al., 2014), yang menunjukkan bahwa kejelasan anggaran dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Sistem pengendalian intern pada penelitian ini berkaitan dengan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang ada pada lingkup kantor pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Hasil persepsi pegawai mengenai sistem pengendalian intern pada kantor pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang dilaksanakan selama ini sudah berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan pengendalian sudah terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan pimpinan dari masing-masing SKPD dalam lingkup kantor pemerintah daerah Kabupaten Enrekang selalu melakukan penilaian kualitas pengendalian intern yang dilaksanakan selama ini. Kemudian dilihat dari pemantauan dalam pelaksanaan intern khususnya pada SKPD pada kantor pemerintah daerah Kabupaten Enrekang maka tindak lanjut yang dilaksanakan selama ini maka OPD selalu melakukan perbaikan pengendalian intern yang dilaksanakan selama ini agar pengelolaan akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selain itu dalam pengendalian intern dalam lingkup kantor pemerintah daerah masing-masing unit SKPD selalu menetapkan rencana kerja dalam pengelolaan guna mengurangi pelanggaran terhadap pelaksanaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam lingkup SKPD pemerintah Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang khususnya yang berkaitan dengan kegiatan dan prosedur

pengamanan aset telah diimplementasikan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pengamanan fisik seperti barang inventaris, pengamanan barang tidak bergerak selalu dilakukan pemasangan tanda kepemilikan kantor pemerintah daerah. Kemudian dilihat dari pengamanan administratif maka bagian inventaris kantor melakukan pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker, sehingga dengan adanya pemasangan label dimaksudkan untuk mengatasi kehilangan barang inventaris yang dimiliki oleh kantor pemerintah daerah. Selain itu dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa saluran komunikasi yang berkelanjutan telah dilaksanakan secara transparansi dan efektif bagi masyarakat, aparatur pengawasan intern sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan, hal ini dilaksanakan dengan tersedianya informasi informasi seperti penggunaan anggaran belanja daerah untuk membiayai sejumlah program, dimana setiap masyarakat dapat melihat dari laporan realisasi anggaran yang tersedia dalam website kantor pemerintah daerah, kabupaten Enrekang (<https://enrekangkab.go.id/>) dan hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga dengan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan selama ini dapat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapat yang dikemukakan oleh (Mulyadi, 2016; Langi et al., 2019) bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan maka perlu diperhatikan sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu (Fitrawati, n.d.; Pujiono et al., 2016; Saputra, 2018) yang penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang, dimana semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka kinerja keuangan daerah akan semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja yang diterapkan selama ini sudah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sistem pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang menekankan pada efisiensi dalam penyelenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan selama ini. Dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sudah dikategorikan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari rencana kerja anggaran (RKA) yang dilaksanakan selama ini telah memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, selain itu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah menjabarkan mengenai visi, misi dan program kerja daerah, dimana dalam RPJMD yang telah ditetapkan menurut visi, dan misi beserta program kerja yang akan dilaksanakan pada masing-masing SKPD pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kemudian dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang dimana setiap program kerja dan rencana kerja anggaran telah dikoordinasikan oleh atasan dan selain itu dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja telah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Pendapat yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2021) bahwa anggaran berbasis kinerja (performance budget) pada

dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja keuangan. Kemudian Bastian (2011) mengemukakan bahwa performance budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2009; Purnamasari, 2018) yang menemukan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan dalam penelitian ini yaitu pertama, disarankan agar setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menyusun rencana kerja dan anggaran secara jelas dan komprehensif pada setiap bagian atau bidang. Kedua, untuk meningkatkan kinerja keuangan maka disarankan agar perlunya setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk selalu memiliki rencana dalam pengelolaan anggaran sehingga hal ini terhindar dari adanya pelanggaran-pelanggaran keuangan. Dan ketiga, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Enrekang agar dalam penyusunan rencana kerja anggaran maka perlunya dilibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).

Referensi:

- Abbas, A. H. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Amanna Gappa*, 30-41. <https://doi.org/10.20956/Ag.V28i1.9840>
- Abdul Halim, M. S. K. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150-159. <https://doi.org/10.32639/Jiak.V9i2.454>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42. <https://doi.org/10.33369/Fairness.V3i1.15274>
- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Esni, M. T., Made, A., & Wulandari, R. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.21067/Jrma.V7i2.4254>
- Fitrawati, F. (N.D.). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian

- Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Parigi Moutong). *Katalogis*, 5(12).
[Http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/9801](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/9801)
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171-182.
[Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33369/Fairness.V8i3.15207](https://doi.org/https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207)
- Handayani, P. T., & Retnani, E. D. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Skpd. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 7(3).
[Http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/98/96](http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/98/96)
- Hanum, S., Zulfiar, E., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Dinas Dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (Jaktabangun) Stie Lhokseumawe*, 3(3), 86-96.
[Http://E-Jurnalstielhokseumawe.Com/Ojs3/Index.Php/Jaktabangun/Article/View/62](http://ejournalstielhokseumawe.com/ojs3/index.php/jaktabangun/article/view/62)
- Haryono, H., & Djasuli, M. (2016). Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka-Skpd) Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1).
[Https://Proceeding.Unpkediri.Ac.Id/Index.Php/Senmea/Article/View/57](https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/57)
- Hasanuddin, R., Elpisah, E., & Muslim, M. (2021). The Influence of Financial Performance Dimensions on Local Government Capital Expenditure Allocation. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 291-300.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star-Study & Accounting Research*, 11(1), 1-14.
[http://stembi.ac.id/file/1.%20Tuti%20Herawati%20\(STAR%20Vol%20XI,%20No%201%20-%202014\).pdf](http://stembi.ac.id/file/1.%20Tuti%20Herawati%20(STAR%20Vol%20XI,%20No%201%20-%202014).pdf)
- Hidayat, T. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Manajerial. *Akuntabilitas*, 8(2), 148-161.
[Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.15408/Akt.V8i2.2769](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/akt.v8i2.2769)
- Ibrahim, S., Diibuzie, G., & Abubakari, M. (2017). The Impact Of Internal Control Systems On Financial Performance: The Case Of Health Institutions In Upper West Region Of Ghana. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 7(4), 684-696.
[Https://M.Merogostar.Com/Papers_Submitted/2840/The_Impact_Of_Internal_Control_Systems_On_Financial_Performance_The_Case_Of_Health_Institutions_In_Upper_West_Region_Of_Ghana.Pdf](https://m.merogostar.com/papers_submitted/2840/the_impact_of_internal_control_systems_on_financial_performance_the_case_of_health_institutions_in_upper_west_region_of_ghana.pdf)
- Indrawati, N. (2016). Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Management: Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2).
[Http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/474/435](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/474/435)
- Kalauw, A. A. (2018). Pengaruh Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektifitas Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Maneksi*, 7(2), 74-85.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v7i2.180>

- Kennis, I. (1979). Effect Of Budgetary Goal Characteristics On Managerial Attitudes And Performance. *He Accounting Review*, 54 (No 4), 707-721.
- Langi, B., Saerang, D. P. E., & Gerungai, N. Y. T. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada Pt. Gemilang Emas Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22324.2019>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Bpfe-Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mauro, S. G., Cinquini, L., & Grossi, G. (2017). Insights Into Performance-Based Budgeting In The Public Sector: A Literature Review And A Research Agenda. *Public Management Review*, 19(7), 911-931. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243810>
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 327-340. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Eka/Article/View/778>
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 68-81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/bisma/article/view/5956>
- Purnamasari, P. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan (Penelitian Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat: Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/je.v5i2.964>
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020, October). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. In *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)* (pp. 1-6). Atlantis Press.
- Sari, R., & Muslim, M. (2021). The Role of Internal Control System on Characteristics of Village Financial Reports. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 239-255.
- Siregar, H. S. (2009). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/43903>
- Tolley, S. S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 5(2). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/8502>
- Wiprast, I. G. A. K. Y., Sinarwati, N. I. K., Herawati, N. T., & Ak, S. E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada 15 Skpd Berupa Dinas Di Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/slak/article/view/2879>